

POLITIK SANTRI : PEMIKIRAN DAN AKSI (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN TEBUIRENG)

Oleh:

ZAINUL FANANI

Dosen STAIN DPK Universitas Jember

Abstract

This research is aimed at understanding the political thought and action of Tebuireng's santri from their own perspectives. Based on the emic perspective, the analysis unit is a sosial phenomenon that can be seen. This research focuses on understanding the world of santris's themselves.

This research has two assumptions, first, the choice and political tendencies of Tebuireng's santri is not placed to critical "appreciation" and rational. They "come" just as "a vice" of structural part with extreme role. The political understanding is not the result of the pure creative "ijtihad".

The second assumption, on the contrary, their political behavior is individual interpretation that involved understanding and awareness that is not mechanical. So, no wonder why the equal certain value could be heterogenous at the understanding level. In this case, the political social realism of santri was full of subjective dimension that was not only one but varied, depends on the variety of subjective meaning on the level of the people involved in that politics.

This theoretical oriented research comes from Giddens's structuration theory that place structure as "virtual order" and "generable procedure" that is also important in seeing Tebuireng's santri political action.

Kata Kunci : Politik Santri, PP. Tebuireng , Sunstansialis, Skripturalis.

PENDAHULUAN

Fenomena kultural yang muncul pada dekade 1980-an, seperti dialog pemikiran, baik Intra umat Islam maupun antar umat beragama, meningkatnya penerbitan buku-buku agama, jurnal, tabloid, buletin Islam, yang begitu banyak melibatkan para pemikir dan ilmuwan, merupakan hal yang mempengaruhi adanya kebangkitan intelektualisme Islam di Indonesia (Anwar; 1995:125). Hal senada juga diungkap oleh Taufik yang secara optimis mengungkapkan bahwa gejala kebangkitan intelektual ini akan membawa dampak yang positif bagi masa depan Islam di Indonesia (Mimbar, No: 111, 1986:38-50) .

Realitas ini tidak terlepas dari peran kelas menengah terpelajar santri yang meminjam istilah Anwar (1995:122) sebagai kelas "menengah santri baru", yang telah

beruntung mendapat pendidikan di berbagai perguruan Tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Peluang mereka untuk mengartikulasikan diri dan masuk dalam komunitas sosial modern semakin terbuka. Dan kondisi semacam ini semakin mempertegas posisi kaum santri untuk mengambil peran-peran situasional ke arah pemberdayaan (*empowering*) masyarakat sipil (masyarakat madani). Situasi seperti inilah yang kemudian menjadi sebab munculnya kelompok-kelompok independen yang secara aktif melakukan tawar-menawar (*bargaining*) kepada negara sebagai kekuatan politik dan ekonomi. Mainstream perjuangan mereka bukan pada penegasan simbol-simbol dan tata "Islam politik" (*political Islam*) tetapi pada "Islam kultural" (*cultural Islam*) yang menekankan pada substansi dan fungsionalisasi nilai-nilai Islam.

Proses intelektualisasi santri yang masif ini kemudian mendorong berkembangnya lapisan menengah muslim yang partisipatif dan kostruktif terhadap modernisasi dan pembangunan. Keberhasilan mereka terutama dalam membumikan gagasan keislaman, kemodernan, dan kelindonesiaan dalam bahasa populer rasional, kontekstual jauh dari semangat ideologis yang ekstrim. Karenanya gagasan mereka tidak normatif dan doktrinal, tapi berorientasi pada empirisme dan pemecahan problematika umat Islam. Semangat Islam politik yang mengedepan di kalangan santri tersebut kemudian menjadi apa yang dinamakan islamisasi birokrasi (Maarif, 1995, 152). Bagi santri yang masuk pada elit birokrasi, dalam istilah Madjid (1997:61) terjadi proses "santrinisasi birokrasi". Sedangkan yang berada di luar birokrasi, terutama yang menjadi aktifis LSM aktif dan giat memperkuat rakyat lewat praktis politik dan tawar menawar dengan negara. Mereka mengembangkan pendekatan Islam transformatif yang mendorong kesadaran sosial politik dan perubahan struktur ekonomi masyarakat (Maarif, 1995:159).

Perbedaan itu kemudian nampak antara kelas menengah santri lama dan kelas menengah santri baru (neo-santri). Artikulasi politik santri lama cenderung romantis, dengan sikap keberagaman yang skripturalistik, menekankan penegasan diri serta orientasi perjuangan politik yang mengutamakan keterikatan pada formalisme ideologis teks Islam politik (*political Islam*). Berbeda dengan santri baru, mereka cenderung pragmatis, mengutamakan pendekatan rasional nilai, terbuka, serta reseptif terhadap perubahan, tidak mempunyai ikatan primordial dengan tokoh-tokoh partai Islam masa lalu, seperti kelompok santri lama. Komitmen perjuangannya lebih mengutamakan pada substansi dan fungsionalisasi nilai-nilai Islam kultural (*cultural Islam*) (Anwar, 1995:122).

Penelitian ini berangkat dari asumsi

bahwa budaya politik santri sangat terkait dengan akar sosial dan komunitas di mana kaum santri bersosialisasi. Kepercayaan nilai dan norma tertentu amat berpengaruh dalam menentukan pola perilaku, praktek sosial sehari-hari demikian juga dengan perilaku politiknya. Pilihan-pilihan dan kecenderungan politik tidak di tempatkan pada "apresiasi" yang "kritis" dan rasional. Santri atau kaum santri "tampil" hanya sebagai "wakil" dari bagian struktur yang secara ekstrim mengaturnya. Pemahaman tentang politik tidak lebih dan tidak kurang bukan hasil "ijtihad" kreatif yang murni. Dominasi struktur yang lebih dekat dengan kaum santri dan bisa dijadikan analisa adalah nilai atau struktur yang ada dalam lembaga Pesantren. Sehingga tidak berlebihan jika sikap paternalistik menjadi lebih mewarnai, dan punya pengaruh besar dalam segala aspek pilihan kehidupan kaum santri.

Asumsi kedua adalah sebaliknya, perilaku politik kaum santri merupakan interpretasi individu. Perilaku tersebut adalah ungkapan ide yang melibatkan pemaknaan dan kesadaran yang tidak mekanistik. Kaum santri seperti konsep Weber, dalam melakukan tindakan-tindakan sosial, senantiasa mempertimbangkan konsekwensi/tuntutan sosial (*social action*). Sehingga tidak heran suatu nilai tertentu yang sama bisa menjadi heterogen pada tingkat pemaknaannya. Temuan-temuan peneliti sebelumnya yang beragam mengenai pola perilaku politik santri adalah contoh bahwa sudah terjadi dinamisasi dikalangan kaum santri.

Dua kutub asumsi pemikiran ini sejalan dengan teori strukturasi Giddens (dalam Faisal, 1998) yang digunakan sebagai orientasi teoritis. Perspektif strukturasionistik ini menempatkan struktur sebagai "tatanan bayangan" (*virtual order*) dan "patokan umum" (*generalizable procedure*) yang ikut diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh para santri dalam aktivitas keseharian, khususnya dalam politik. Berangkat dari teori

ini kemudian asumsinya adalah perilaku politik santri bisa terbentuk dari struktur dan agensi (pelaku). Sehingga lebih relevan jika penelitian ini kemudian memakai pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pemikiran dan aksi politik kaum santri dari perspektif mereka sendiri. Yang bertitik tolak pada perspektif dimana sebagai unit analisisnya adalah fenomena sosial yang nampak. Pusat perhatian dalam penelitian ini adalah dunia pemaknaan para santri yang bersangkutan yang berdomosili di Pesantren Tebuireng, pertama, tentang apa yang mereka definisikan dengan Islam dan politik kaitannya dengan polemik besar antara kubu skripturalis dan kubu substansialis, jika kemudian kategorisasi itu ada. Kedua, bagaimana dari pemaknaan dan kategorisasi mereka dijadikan acuan ditingkatkan praktis keseharian. Serta kerangka berfikir yang bagaimana yang melatar belakangi pemikiran dan perilaku politik mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Seperti yang diungkap Geertz, di mana pendekatan yang dilakukan dicapai dari hasil "membaca" bagaimana sang pelaku itu sendiri memahami dunianya (*Upaya understanding of understanding*) (Faisal, 1998:5). Atau memandang sesuatu dari sudut pandang dan perspektif mereka sendiri (Bodgan, 1993:45). Tradisi Penelitian kualitatif pada dasarnya menganggap bahwa fenomena sosial merupakan dunia makna yang melekat pada diri subyek (manusia) pelakunya senantiasa melibatkan interpretasi, kesadaran, dan makna subyektif ditingkat individu sebagai manusia pelaku suatu tindakan sosial (Faisal, 1998).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*Case Study Approach*), yaitu suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Surachman, 1982:193). Me-

tode ini juga akan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku individu (Sevilla, 1993). Dan seperti yang dikembangkan oleh Bodgan dan Biklen (1982) studi kasus dalam penelitian ini digolongkan dalam tipe studi kasus analisa situasional, dimana situasi sosial yang tampak adalah isyarat dari letusan-letusan situasi dari peristiwa peristiwa tertentu.

Kaitannya dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti ini menerapkan strategi sebagai berikut: pertama, penelitian ini memberikan perhatian terhadap perilaku keseharian santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan ungkapan-ungkapan sehari-hari terutama berkaitan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan diskusi ringan. Dan kehadiran peneliti tidak resmi mengungkap secara detail maksud penelitian yang sedang dilakukan, guna melihat sampai sejauh mana ekspresi-ekspresi spontan tentang masalah penelitian yang dimaksud.

Kedua, peneliti melakukan kembali wawancara namun dilakukan secara mendalam dan kali ini peneliti mencari informan atau pelaku politik yang peneliti anggap mewakili masing-masing kelompok santri. Maksud dari wawancara kedua ini adalah agar bisa di temukan pemaknaan yang sesungguhnya dari apa yang sebenarnya mereka ekspresikan pada awal. Teknik wawancara dilakukan dengan bervariasi, tertulis (*point test*) maupun langsung (*interview*), hal ini diperlukan agar informasi yang diberikan tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.

Disamping observasi, wawancara secara langsung, dan diskusi, didalam memperoleh data penelitian ini juga mempertimbangkan data-data sekunder seperti beberapa penelitian para peneliti terdahulu.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data, membandingkan antara satu ke-

jadi dengan yang lainnya, melakukan kategori-kategori dan analisa secara mendalam. Strategi pada tahap ini tidak sepenuhnya dilakukan dibelakang meja tetapi juga simultan dengan kegiatan mengumpulkan data. Data disajikan dalam bentuk "naratif", artinya beberapa data yang terkumpul peneliti jadikan dalam analisa laporan yang terkait antara satu dengan lainnya, dalam penelitian kualitatif hal ini seringkali dikategorikan dengan penyajian data secara "ethik". Namun agar tidak menimbulkan dugaan bahwa penelitian terlalu "tercampuri" oleh pendapat peneliti pribadi, maka sebagian data peneliti sajikan dengan apa adanya dengan tidak mengurangi atau menambah data, supaya tidak mengurangi orisinalitas penelitian ini, dalam penelitian kualitatif penyajian data seperti ini digolongkan dalam penyajian data secara "emik". Jadi dalam hal ini penyajian data yang peneliti lakukan memakai dua "basic", secara "etik perspektif" dan "emik perspektif".

Proses penentuan informan kunci dilakukan dengan cara purposive sampling (sengaja), sesuai dengan setiap tahapan yang telah dilakukan diatas, seperti yang dilakukan oleh Kanto sampai pada tingkat kejenuhan tertentu, dimana sudah tidak terjadi variasi informasi (replikasi informasi). Sehingga informan akan terpilih dengan sendirinya, seperti tehnik prosedur penelitian sampel secara konvensional, yakni tehnik snowball sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Pemikiran Politik Santri Tebuireng

Mengenai konsep politik pada kalangan santri Tebuireng terdapat pemahaman, bahwa Islam itu juga mempunyai obyektifikasi nilai-nilai politik, dan politik adalah salah satu bagian dari aktifitas da'wah, artinya berpolitik tidak lebih dari sebuah sarana tehnik untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan demokrasi sesuai dengan semangat Islam. Persoalan seseorang memaknai politik tersebut dalam

sudut pandang yang formal ataupun sebaliknya, harus disikapi dengan semangat pluralitas, sebab Islam sendiri memberi tempat bagi "perbedaan pendapat".

Bagi Musta'in sebagai seorang muslim setiap aksi itu harus diibadahkan, karena akan ada nilai pahalanya. Begitu juga dengan politik, ia juga harus dipandang sebagai instrumen keagamaan. Persoalan ijtihad memaknai instrumen itu dalam alam keindonesiaan dengan menggunakan instrumen formal ataupun tidak itu hanya persoalan strategi. Pernyataan Musta'in tersebut jika dikaitkan dengan *Khittah NU 1926*, adalah jalan keluar yang terbaik bagi para anggota jama'ah NU. Mengingat keinginan sebagian anggotanya yang ingin aktif dan terjun langsung pada partai tertentu, tidak bisa melaksanakan, dan dengan catatan tidak membawa institusi NU sebagai lembaga. Artinya semangat kesadaran untuk mengembalikan jam'iyah tersebut pada citra idealnya sebagai organisasi sosial dan keagamaan harus tetap dijaga.

Obyektifikasi nilai-nilai politik dalam Islam kemudian menimbulkan berbagai model gerakan politik yang dilakukan oleh ummat Islam. Menurut Zamawi (salah seorang Ustad Tebuireng, Pengurus Cabang PKU Jombang, wawancara 29 Agustus 1999), perjuangan politik umat Islam akan lebih efektif jika diperjuangkan didalam partai. Menurutnya politik identik dengan kekuasaan, sehingga pembentukan partai politik yang berazaskan Islam amat diperlukan untuk memperebutkan kekuasaan tersebut. Pandapat yang sama juga diberikan oleh Jazuli (Kepala Sekolah MASS Aliyah Tebuireng, Pengurus Cabang PKB Jombang), bahwa Islam memiliki konsep *rahmatan li al-alamin*, yang tidak sekedar mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan yang lainnya. Sehingga Islam sangat perlu diformulasikan dalam bentuk partai.

Partai politik Islam dibutuhkan bukan

hanya sekedar untuk menjamin adanya keterwakilan aspirasi umat Islam, tapi lebih jauh dari itu untuk mewarnai konstelasi politik nasional dengan nuansa relegius. Dengan munculnya parpol Islam dimensi moral agama dalam percaturan politik tidak diabaikan seperti yang sering terjadi dalam masa sebelumnya (Falah, *Republika*, 30 Juni 1999). Namun menurut Jayadi, ekspresi politik umat Islam lebih baik tidak diformulasikan dalam bentuk partai. Karena menurutnya akan mereduksi nilai-nilai luhur dari agama ini sendiri. Ungkapan tersebut senada seperti yang diungkap Falah (*Republika*, 30 Juni 1999), bahwa kecenderungan parpol Islam hanya akan memperlihatkan simbol dan atribut keagamaan yang kadang-kadang bernada provokasi dari pada memperlihatkan citra itu sendiri yang rahmatan lil – al alamin.

Yang lebih moderat adalah pendapat Musta'in, secara konseptual ia lebih cenderung memahami Islam secara substansial namun menurutnya dikotomi antara Islam formalis (Islam politik) dan sustansial sebenarnya bukan dikotomi kontradiksi, malah kalau bisa dikawinkan sebagai kemitraan yang interaktif. Alasannya adalah masyarakat Indonesia sulit untuk dikotak menjadi masyarakat *maki* atau *madani*. Indonesia negara yang sedang chaos yang tidak sama dengan pertumbuhan negara-negara lain yang mempunyai klasifikasi agraris, industri, dan sebagainya. Satu sisi ada masyarakat yang sudah maju tingkat pendidikan dan kesejahteraannya, dan ada yang malah jauh tertinggal. Sehingga agama menurutnya tidak bisa dilandaskan dengan satu teori saja. Untuk masalah ini Supa'at juga mengomentari bahwa berpolitik itu tidak harus lewat partai, ada juga santri Tebuireng yang masuk ke LSM, atau malah ada yang apatis (Golput).

Perdebatan ini sesuai dengan pernyataan Hefner, ciri penting politik muslim diseluruh dunia sekarang ini adalah perebutan penafsiran terhadap simbol-simbol dan penguasaan

terhadap lembaga-lembaga yang melahirkan dan mempertahankannya baik formal maupun informal. Ciri yang menonjol adalah apa yang disebut sebagai "obyektifikasi" pengetahuan keagamaan dan pluralisasi wewenang keagamaan (Hefner, 2000:3).

Pengaruh Politik Kiai Tebuireng

Gejala paternalistik dalam politik yang menjadi "tradisi" pesantren sebenarnya sudah mulai nampak berkurang, meskipun dari beberapa observasi penulis masih ditemukan beberapa kasus. Dan justru pada pemilu 1999 gejala polarisasi politik santri Tebuireng agak mulai kelihatan. Santri Tebuireng yang pada awalnya masih tertutup dan cenderung tidak terbuka dalam mengekspresikan afiliasi politiknya, sekarang sudah mulai berani meskipun terkesan "malu-malu", meminjam istilah Al Chaidar (1999:14), bahkan berani berbeda pilihan politik dengan pengasuh pesantrennya. Seperti kasus Hidayat (Ustad Pesantren Tebuireng, anggota dewan dari FPKB) yang secara pribadi telah meminta izin kepada Pak Yusuf untuk aktif di PKB. Bahkan Pak Yusuf memberikan dukungannya ketika ia memimpin "tim lima" dalam pembentukan PKB untuk daerah Kabupaten Jombang, dengan memberikan beberapa catatan pesan, bahwa jika masuk partai jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak demokratis,

Dialog ini mengisyaratkan bahwa dominasi peran kiai pada pilihan-pilihan politik santri Tebuireng sudah mulai berkurang dan hampir tidak terjadi lagi. Santri diberikan peluang sebebaskan-bebasnya dalam mengaspirasikan politiknya, walaupun masih diberikan nasehat-nasehat seperlunya. Berbeda dengan pemilu 1987 ketika pengasuh secara tegas mengeluarkan keputusan yang mengatur, jika terdapat guru atau ustad ataupun pengasuh yang menjadi calon salah satu partai politik, mereka harus memilih antara tetap menjadi calon partai politik tersebut atau mengundurkan diri dari keterlibatannya

sebagai guru, ustad dan pengasuh pesantren Tebuireng atau sebaliknya (Bruineesen, 1994). Pernyataan ini disikapi oleh beberapa santri bahwa keputusan tersebut sebenarnya karena pengaruh politik nasional, dimana pengasuh ketika itu merasa dirugikan oleh kelompok Naro, sehingga berimbas kepada konstelasi politik lokal Tebuireng. Meskipun begitu menurut Supa'at, Pak Ud tidak pernah mengajak atau tidak memilih partai tertentu terhadap para santri.

Bahkan menurut pendapat Syafi'i, ustad senior yang selama ini cenderung tidak aktif dalam berpartai, namun selalu menjadi idola santri karena kepakaran ilmu agamanya, menyatakan bahwa mungkin pesantren Tebuirenglah satu-satunya pesantren yang pengasuhnya memberikan kebebasan berpolitik bagi kalangan santri, meskipun secara pribadi pengasuhnya mendirikan partai sendiri. Mengenai budaya paternalistik dalam politik ini, dalam istilah Syafi'i budaya "taqlid politik" memberikan penjelasan bahwa "taqlid politik" tergantung pada watak dasar sebuah pesantren. Semakin eksklusif sebuah pesantren "taqlid" berpolitik semakin tinggi. Berbeda dengan semakin terbuka sebuah pesantren "ijtihad" berpolitik semakin tinggi. Menurut Syafi'i Tebuireng adalah salah satu pesantren yang "bebas" untuk periode pemilu 1999. dimana seorang pengasuh yang mendeklarasikan sebuah partai memberikan kebebasan kepada para santrinya.

Motivasi Politik Santri Tebuireng

Selanjutnya motivasi berpolitik dalam partai secara konseptual kaum santri di Tebuireng lebih mengarah pada taraf "coba-coba", dan menurut bahasa mereka "belajar" politik lewat partai. hal tersebut tentunya tidak terlalu mengada-ada mengingat beberapa santri Tebuireng yang menjadi praktisi partai, tergolong merupakan "pemain-pemain" baru, namun meskipun begitu ada beberapa dari mereka yang telah masuk menjadi Anggota

Dewan seperti Hidayat mewakili FPKB.

Perbedaannya, motivasi tersebut muncul dalam kerangka berfikir yang *origin*, atau motivasi itu keluar ketika kesempatan untuk berpartai itu ada. Seperti kasus yang penulis lihat ketika PKU didirikan, ada tawaran bagi para santri senior untuk masuk menjadi pengurus baik di Pusat maupun Daerah. Zamawi misalnya mengambil peluang ini untuk aktif menjadi pengurus PKU di daerah Jombang. Pilihannya tersebut lebih awal muncul karena secara pribadi Zamawi lebih menekankan bahwa berpolitik baginya adalah "belajar" terlebih dahulu. Orang yang ingin "alim" dibidang politik disamping membaca teori-teori politik secara konseptual juga harus terjun langsung dalam politik praktis.

Penjelasan ini mirip seperti yang diuraikan oleh Supa'at (Pengurus PKU Cabang Jombang, Staf pengajar di PT, dan ustad Tebuireng), alasan berpolitik dalam partai menurutnya adalah sebagai media atau instrumen dalam menyalurkan aspirasinya, yang selama ini telah ia pelajari dalam teori-teori politik. Berpartai baginya adalah media untuk menjadi seorang politikus yang profesional. Bahkan menurutnya jika seseorang pada awalnya sudah berkepentingan untuk meraih target tertentu dalam partai, misalnya "kursi" atau yang lainnya, itu berarti politikus "dadakan". Untuk itu seorang yang ingin "alim" dalam berpolitik mereka harus berproses terlebih dahulu. Alasan inilah kemudian yang mendasari Supa'at untuk memilih partai yang lebih kecil, karena menurutnya aspirasi seseorang akan lebih diperhatikan jika masuk pada komunitas yang lebih kecil. Dan yang paling penting politik tersebut menguntungkan bagi umat, karena politik itu tujuannya untuk perbaikan. Meskipun begitu ia juga berpendapat politik itu tidak harus masuk partai.

Kategorisasi Politik Santri Tebuireng

Beberapa karakteristik berdasarkan hasil penelitian ini tampak bahwa (1)

konsep kaum santri tentang politik tidak dapat direduksi menjadi sekedar kategori politik, karena politik itu berkaitan dengan kelompok (partai) atau aliansi kepentingan dan kesempatan, (2) kegiatan politik kaum santri tidak dapat dipertahankan terhadap pilihan dan afiliasi politik tertentu santri, sebab aktivitas politik juga merupakan bagian dari orientasi dakwah Islamiyah, (3) tujuan berpolitik santri tidak bisa direduksi sebagai tujuan politik semata, karena konsep politik kaum santri juga tidak lepas dari pemaknaan kerangka berfikir konstruksi keagamaan yang diimani.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep politik kaum santri merupakan suatu fenomena yang pemaknaannya tergantung pada konstruksi sosial budaya setempat. Konsep politik pada kaum santri Tebuireng di tempat penelitian, memiliki konsep yang lebih luas dari hanya sekedar konteks politik. Bahwa politik ditempatkan sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan dan alat dalam merealisasikan cita-cita Islam. Lebih jauh aktivitas politik sangat terkait dengan pemaknaan ibadah seseorang (Mulkan, 1994:99). Bahkan prestasi terhadap perolehan-perolehan "keuntungan" dalam berpolitik tidak dianggap sebagai suatu status sosial yang menentukan. Berpolitik bagi kalangan santri hanya sebagai sarana atau instrumen, pemaknaannya tergantung masing-masing pribadi dan pandangan hidup ditingkat individu. Sehingga bisa dirasakan pertimbangan citra diri dan budaya seorang santri yang masih mempertimbangkan budaya "pakewuh" (sungkan:malu). Pada tingkat ini tidak begitu tampak kategori yang dipaparkan oleh Lidle antara kaum substansialis dan skripturalis, sehingga eksplorasi yang diperoleh oleh penulis hanya tampak secara implisit dan hampir tidak ada, juga tidak tegas dalam perilaku keseharian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa logika dasar politik santri cenderung

akomodasionis, dan tidak mutlak-mutlakan, seperti yang dikemukakan oleh Lidle. Sehingga perbedaan nilai antara kelompok antagonis yang tampak, tidak sampai pada munculnya konflik yang aktual seperti yang disinyalir oleh Dahrendorf, karena konflik dalam realitas pesantren menurut Simmel dipandang sebagai sebuah kerangka instrumen bukan sebuah tujuan akhir. Sehingga sesuai apa yang dikatakan Coser bahwa Pertentangan dua kelompok terhadap isue sebuah nilai tidak sampai menimbulkan perpecahan kelompok. Namun pada persoalan strategi dan pilihan model politik yang diambil tidak serta merta menjadi model yang mendasari kerangka berfikir dalam strategi dakwah Islamiyah seperti kategori Lidle, skripturalis dan substansialis.

KESIMPULAN

Berdasarkan *perspektif emik* para santri politik dalam Islam diberi makna sebagai salah satu instrumen gerakan dakwah Islamiyah. Sehingga mencurahkan segenap aktivitas tenaga dan fikiran dalam hal positif baik dipartai maupun tidak juga dimaknai ibadah. Pemaknaan ini jelas terkait dengan budaya pesantren yang selalu mengajurkan para santri untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Dan menjadi satu "pemeo" jika ilmu yang diperoleh tidak diamalkan akan tergolong menjadi ilmu yang tidak bermanfaat.

Khusus mengenai perilaku berpartai dalam persoalan konteks pilihan-pilihan politik pada prakteknya menampakkan heterogenitas. Para pelaku memiliki pendirian tertentu, (1) mereka yang masih dalam taraf "malu-malu" berpolitik dan cenderung untuk coba-coba dikarenakan diberi kesempatan dan didukung oleh fasilitas, watak mereka sedapat mungkin untuk tidak melakukan "benturan-benturan" konflik dengan kelompok yang lain, (2) mereka yang secara tegas berani mengekspresikan pilihan politiknya bahkan berbeda sekalipun

dengan pengasuh, komunikasi yang dibangun kritis namun tetap memakai "prilaku" pesantren, (3) mereka yang tidak ikut dalam partai, namun secara intens tetap melakukan kegiatan-kegiatan politik diluar partai, seperti pengembangan sumber daya manusia. Kategori tersebut (lihat tabel) merupakan hasil interpretasi dari sejauh mana kader optimalisasi peran personal terhadap pilihan-pilihan pribadi ditingkat agen (pelaku).

Kategori kelompok yang pertama, pendekatan yang dipakai dalam meminjam istilah Budiman (1997:42) adalah "sebahasa" (atau paling sedikit tidak bertentangan) dengan pengasuh ataupun kelompok politik yang lain. Identitas politik yang dimaknai bukan pada seberapa jauh program partai yang sedang diperjuangkan, tapi sekedar coba-coba dan mencari posisi "selamat". Keterlibatan mereka ada kesan "ambiguitas" satu sisi mereka diberikan tawaran kesempatan dalam berpolitik praktis, namun sisi lain mereka tidak bisa mengapresiasi pilihan politiknya secara tegas, dengan alasan setiap pilihan model politik cenderung memiliki kelemahan dan kelebihan. Padahal menurut Budiman perbedaan terpenting dalam pilihan politik bukan pada pendekatannya, tapi pada substansi perjuangannya. Kategori kelompok yang kedua, pendekatannya tidak terlalu dipentingkan, mereka lebih intens pada sejauh mana program politik dikedepankan. Kadang-kadang bisa "sebahasa" dengan kelompok lain ataupun pengasuh pesantren, namun seringkali mengambil posisi kritis dalam melakukan komunikasi. Mereka berani mengapresiasi pilihan politiknya dengan resiko seberat apapun. Sedangkan kategori kelompok ketiga, lebih bisa berkomunikasi secara lugas dengan siapapun, karena politik dimaknai tidak harus dengan identitas tapi lebih mengedepankan nilai yang dibawa, kategori ini banyak terdapat pada para akademisi dan intelektual pesantren.

Heterogenitas politik kaum santri

tidak sepenuhnya dikarenakan pertimbangan-pertimbangan politik, melainkan juga berkaitan dengan "posisi" santri dalam lingkup pesantren. Hal ini merupakan etos budaya "sungkan" yang menjadi pandangan hidup kaum santri. Namun begitu, semangat untuk keluar dari "tradisi" itu cukup kuat, apalagi dari kalangan elit santri juga memberikan kesempatan yang lebih untuk memberikan kebebasan pendidikan politik bagi kalangan santri secara keseluruhan. Persoalannya ditingkat santri ada juga keinginan untuk tetap mempertahankan budaya "lama" tersebut.

Walhasil berdasarkan temuan penelitian ini ternyata budaya lokal politik santri Tebuireng memiliki ciri khas tersendiri (lihat Tabel).

Tabel: 1
Pola Pilihan Santri Masuk Parpol Berdasarkan Kadar Optimalisasi Peran Individu Terhadap Pilihan Pribadi Pada Pemilu 1999

No.	Jenis Pilihan	Kecenderungan
1.	Coba-coba Memilih	<ul style="list-style-type: none"> - Malu-malu dalam mengekspresikan pilihan politik. - Karir politik dibangun tergantung kesempatan yang diperoleh. - Komunikasi yang dibangun sebahasa supaya tidak berbenturan dengan kelompok lain.
2.	Tegas memilih	<ul style="list-style-type: none"> - Berani mengekspresikan pilihan politik. - Karir dalam politik dicari/diperjuangkan. - Komunikasi, kritis dan berani bahkan berbenturan sekalipun dengan kelompok lain, namun tetap memakai ahlak dan prilaku pesantren.
3.	Tidak Memilih	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak membangun karir politik, baik ada kesempatan maupun tidak. - Lebih lugas berkomunikasi dengan siapapun.

Secara garis besar implikasi teoritis

tampak dalam teori strukturasi Giddens dimana realitas dibentuk oleh dualitas struktur yang saling menunjang. Yakni pemaknaan politik santri dibangun oleh struktur yang berlaku dalam lingkungan pesantren, santri hanya tampil sebagai "wakil" dari bagian struktur yang mengaturnya. Asumsi kedua perilaku politik santri merupakan interpretasi individu yang juga melibatkan pemaknaan dan kesadaran yang tidak mekanistik. Santri juga memiliki apresiasi politik yang kreatif. Mirip seperti teori yang ditawarkan Weber, perilaku santri senantiasa mempertimbangkan tuntutan sosial sehingga persepsi nilai yang sama dalam politik santri bisa menjadi heterogen dalam pemaknaannya.

Atas dasar kedua asumsi itu, sangat beralasan jika teori strukturasi Giddens mempunyai sudut kemiripan dengan hasil penelitian terhadap realitas sosial perilaku politik santri Tebuireng. Dan hasil penelitian ini dengan sendirinya juga mendukung teori yang menempatkan realitas sosial sebagai suatu konstruksi sosial/budaya.

Implikasi teoritis yang lain adalah hipotesa disekitar perilaku politik santri. Ke depan politik santri akan lebih "tegas" dan "berani", dan senantiasa akan bersikap kritis terhadap setiap tawaran baru. Komunikasi yang dibangun akan lebih bersifat rasional dan fungsional, apalagi itu demokratisasi dikalangan pesantren sudah semakin berkembang dan "diamini" oleh pengasuh. Kelompok-kelompok yang resisten terhadap perubahan baru akan terjebak pada hal-hal yang bersifat "kosmetik" dan merugikan diri sendiri. Secara perlahan akan "tersudut" dalam komunitas pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed.), 1983, "Agama dan Perubahan Sosial", Rajawali, Jakarta.
- , 1987, Cet. II, "Sejarah dan Masyarakat; Lintasan Historis Islam di Indonesia", Obor, Jakarta.
- Aboebakar, 1957, "Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim", Depag RI, Jakarta.
- Anwar, Staf'i, M, 1995, "Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru", Paramadina, Jakarta.
- Afandi, Afif (Peny.), "Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais", 1997, Cet. III, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aminudin, 1999, "Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Resim Soeharto", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al-Chaidar, 1419 H, Cet. II, "Pemilu 1999 Perlawanan Udeologis Parta-partai Islam Versus Parta—partai Sekuler", Darul Falah, Jakarta.
- Bruinessen, Van, Martin, 1994, Cetk. II. "Tareqat Naqsyabandiyah di Indonesia", Mizan, Bandung.
- , 1994, "NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru", LKIS, Bandung.
- , 1995, "Kitab Kuning Pesantren dan Tareqat; Tradisi-tradisi Islam Indonesia", Mizan, Bandung.
- Benda, J, Harry, 1985, Cet. II, "Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang", Pustaka Jaya, Jakarta.
- Darwis, KH. Ellyasa (ed.), 1994, "Gus Dur NU Dan Masyarakat Sipil", LKIS, Yogyakarta.
- Dhofir, Zamahsari, 1985, Cet. IV, "Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai", LP3ES, Jakarta.
- Faizal Sanapiah (et. Al), 1998, "Metode Penelitian Kualitatif" BMPTSI, Surabaya.
- Furchan, Arief, 1992, "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif", Usaha Nasional, Surabaya.
- Geertz, Clifford, 1983, Cet. I, "Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa" (terj. Aswab Mahasin), Pustaka Jaya, Jakarta
- Hefner, W. Robert, 2000, "Islam Pasar Keadilan", LKIS, Yogyakarta.
- Hadad, Ismid (ed.), 1982, Cet. III, "kebudayaan

- Politik dan Keadilan Sosial", LP3ES, Jakarta.
- Hamzah, Imron dan Anam Choirul, 1999, Cet. II, "Gus Dur Diadili Kiai-kiai Sebuah Dialog Mencari Kejelasan", Bisma Satu, Surabaya.
- Horikoshi, Hiroko, 1987, "Kyai dan Perubahan Sosial", P3M, Jakarta.
- Mulkan Munir Abdul, 1994, Cet. I, "Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan Dalam Islam", Sypress, Yogyakarta.
- Madjid, Nurcholish, 1997, "Kaki Langit Peradaban Islam", Paramadina, Jakarta.
- , 1997, "Tradisi Islam Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia", Paramadina, Jakarta.
- Malik, Djamaludin, Dedy dan Ibrahim, Subandi, Idi, 1998, "Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik", Zaman, Bandung.
- Ma'arif, Syafi'i, Ahmad, 1995, Cet. II, "Membudayakan Islam", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 1996, Cet. III, "Studi Percaturan Dalam Konstituante; Islam dan Masalah Kenegaraan", LP3ES, Jakarta.
- Noer, Dahliar, 1983, "Islam Pancasila dan Asas Tunggal", Yayasan Perkhidmatan, Jakarta.
- Rais, M., Amin, 1998, Cetk. III, "Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan", Mizan, Bandung.
- Suryanegara Mansur Ahmad, 1995, Cet. II, "Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia", Mizan, Bandung.
- Steenbrink, A, Karel, 1986, "Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Moferen", LP3ES, Jakarta.
- , 1995, "Kawan Dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)", Mizan, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, "Georg Simmel Beberapa Teori Sosiologis", Rajawali, Jakarta.
- Tanter, Rishad dan Young, Kenneth, 1993, "Politik Kelas Menengah Indonesia", LP3ES, Jakarta.
- Woodward R, Mark, 1998, Cet. I, "Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Baru Islam Indonesia", Mizan, Bandung.
- Wahid, Abdurrahman (et.al), 1991, "Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia", Rosdakarya, Bandung.
- Yusuf, Effendy, Slamet (et.al), 1983, "Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU", Rajawali, Jakarta.